

Bupati-AKPSI Minta Dukungan Kemendagri Optimalkan DBH Sawit



Sumber Gambar: KORAN KALTIM Jumat, 03/10/2025

Jakarta – Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor bersama sejumlah Kepala Daerah yang tergabung dalam Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) melakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri, Akmal Malik, di Jakarta Pusat, Rabu (1/10).

Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Dirjen Otda Gedung F Lantai 8 Kemendagri ini membahas peran strategis daerah penghasil sawit dalam memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH) sawit. Audiensi juga menjadi forum konsultasi mengenai dukungan regulasi lintas kementerian dan lembaga.

“Audiensi ini merupakan bagian dari upaya AKPSI untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari DBH sawit dengan dukungan regulasi yang kuat,” ujar Bupati Mudyat Noor. Ia menegaskan, perkebunan kelapa sawit memiliki kontribusi besar terhadap daya dukung fiskal daerah. Karena itu, optimalisasi DBH sawit sangat penting untuk membiayai pembangunan infrastruktur, termasuk jalan umum yang terdampak aktivitas perkebunan.

“Optimalisasi ini sangat mendesak, agar masyarakat ikut merasakan manfaatnya, khususnya dari perbaikan infrastruktur jalan,” tambahnya. Mudyat menilai, kehadiran AKPSI menjadi wadah strategis bagi daerah penghasil sawit untuk berkolaborasi dengan pemerintah pusat dalam memperkuat kemandirian fiskal berbasis sektor perkebunan.

Sementara itu, Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik menyambut baik langkah AKPSI. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, dan masyarakat demi keberlanjutan pemanfaatan sumber daya perkebunan.

“Regulasi berbasis data sangat penting sebagai dasar sinkronisasi program daerah dengan kementerian/lembaga, termasuk dalam mendukung usulan DBH sawit,” jelasnya. Akmal

juga menyoroti tantangan tata kelola perkebunan sawit, mulai dari kelembagaan petani, keterbatasan infrastruktur, hingga tuntutan global terkait keberlanjutan sektor sawit.

Menutup pertemuan, ia menegaskan komitmen Kemendagri mendukung AKPSI dalam mendorong optimalisasi DBH sawit dan memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui sinkronisasi regulasi maupun audiensi lanjutan ke kementerian terkait. Audiensi tersebut juga dihadiri Bupati Mamuju Tengah, Bupati Pasangkayu, Bupati Mamuju, serta pengurus AKPSI lainnya.

Sumber berita:

1. KORAN KALTIM, Bupati-AKPSI Minta Dukungan Kemendagri Optimalkan DBH Sawit, 03/10/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 111 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022) diatur sebagai berikut:
 - (1) DBH terdiri atas:
 - a. DBH pajak; dan
 - b. DBH sumber daya alam.
 - (3) DBH sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kehutanan;
 - b. mineral dan batu bara;
 - c. minyak bumi dan gas bumi;
 - d. panas bumi; dan
 - e. perikanan.
2. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi kerja sama antara pelaku usaha, perkebunan, asosiasi pemasaran, asosiasi komoditas, dewan komoditas, kelembagaan lainnya, dan/atau masyarakat.